

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jumlah kendaraan bermotor saat ini terus meningkat. Berdasarkan informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur mencatat total jumlah kendaraan wajib pajak di Jawa Timur hingga Agustus 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
JUMLAH KENDARAAN WAJIB PAJAK DI JAWA TIMUR

| No. | Objek Pajak Kendaraan Bermotor | Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Roda dua/sepeda motor | 14.683.653 unit |
| 2. | ST Wagon | 1.084.627 unit |
| 3. | Truk | 578.483 unit |
| 4. | Sedan | 161.336 unit |
| 5. | Jip | 113.563 unit |
| 6. | Bus | 26.680 unit |
| 7. | Alat berat | 1.941 unit |
| | Total | 16.650.282 unit |

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun juga meningkat. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur mencatat tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur hingga bulan Agustus 2016 mencapai lebih dari Rp 300 miliar dari total jumlah kendaraan wajib pajak di Jawa Timur. Meningkatnya jumlah wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi.

Pajak Kendaraan Bermotor memang banyak memberikan manfaat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pajak ini dikelola oleh Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur merupakan suatu instansi pemerintah yang berkedudukan di ibukota Surabaya dan memiliki cabang dinas yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur. Unit Pelaksana Teknis atau biasa disingkat UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur adalah salah satu cabang dari Dinas Pendapatan.

Saat ini banyak wajib pajak yang lupa terhadap kewajibannya untuk membayar pajak setiap tahun. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi menurun. Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menurun dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dari UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur dalam memberikan informasi mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak adalah dengan cara pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur melakukan kegiatan sosialisasi. Bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memberikan brosur kepada wajib pajak, memasang baliho, memberikan informasi melalui radio atau surat kabar serta melakukan operasi gabungan.

Penagihan pajak kendaraan bermotor memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dilakukan karena adanya tunggakan pajak. Jika banyak wajib pajak yang menunggak maka mengakibatkan penerimaan pajak kendaraan menjadi turun. Oleh karena itu, kepatuhan dari wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Semua itu tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar dan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Maka berdasarkan hal tersebut wajib pajak harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Pencapaian Penerimaan Pajak Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur.

1.2 Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan tugas akhir maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara memperingatkan, menegur dan memberitahukan surat pajak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000)

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja maupun pembangunan negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur

Unit kerja dari Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang terletak di wilayah Surabaya Timur yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan dibahas oleh penulis terkait permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur
2. Bagaimana pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur
2. Untuk mengetahui pencapaian penerimaan pajak pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagi UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kegiatan penagihan yang dilaksanakan serta pelayanan yang diberikan untuk masyarakat

Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat dijadikan tolak ukur pemahaman mahasiswa terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan serta menjadi tambahan koleksi perpustakaan

Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama serta menjadi bahan untuk menambah wawasan secara nyata terhadap pelaksanaan penagihan pajak

1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor untuk pencapaian penerimaan pajak berdasarkan data yang didapat dari pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Surabaya Timur.

1.6.1 Sumber dan jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer tersebut berupa wawancara yang terkait dengan penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Sedangkan data sekunder berupa data yang terkait dengan dokumen

untuk pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, jumlah objek pajak, realisasi penerimaan pajak serta gambaran umum tentang UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur.

1.6.2 Pengumpulan data

Cara memperoleh data yang terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor adalah dengan melakukan wawancara ke salah satu pegawai seksi penagihan di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Dalam wawancara yang dilakukan hal-hal yang ditanyakan adalah bagaimana penagihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur, berapa jangka waktu pembayaran yang diberikan setelah dilakukan penagihan, apa yang dilakukan pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur jika meskipun telah dilakukan penagihan namun wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, apakah ada cara lain agar wajib pajak dapat segera melunasi hutang pajaknya.

Peneliti juga mengumpulkan dokumen untuk pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor, jumlah objek pajak, realisasi penerimaan pajak yang didapat dari pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur serta mengakses *website* www.dipendajatim.go.id untuk memperoleh data terkait gambaran umum subyek penelitian.

1.6.3 Ruang lingkup

Agar penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada, maka lingkup pembahasan hanya dibatasi pada pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dan penerimaan pajak selama tahun 2013-2016 yang dilakukan oleh pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Wilayah kerja UPT

Dinas Pendapatan Surabaya Timur tersebut terdiri dari 6 kecamatan yaitu Tambaksari, Mulyosari, Gubeng, Sukolilo, Rungkut dan Gunung Anyar.

1.6.4 Teknik analisis data

Berikut ini adalah teknik analisis data yang dilakukan:

1. Mengumpulkan referensi sebagai landasan teori untuk mendukung data yang diperoleh selama penelitian
2. Melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor kepada salah satu pegawai seksi penagihan di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur
3. Mengumpulkan dokumen terkait pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dan data penerimaan pajak di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur
4. Mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan data dari pihak UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur
5. Membuat kesimpulan tentang pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur
6. Membuat kesimpulan tentang pencapaian penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Dinas Pendapatan Surabaya Timur. Menurut Taufik Fajrin Irfandy (2013) dalam Jurnal Administrasi Publik untuk mengetahui tercapai atau tidaknya penerimaan pajak kendaraan bermotor dibutuhkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor dikatakan tercapai jika jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor lebih besar dibandingkan dengan target pajak kendaraan bermotor

$$\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor} > \text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}$$

2. Menghitung persentase penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jika persentase lebih dari 100% maka penerimaan pajak kendaraan bermotor dikatakan tercapai. Penerimaan pajak dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi pajak kendaraan bermotor}}{\text{Target pajak kendaraan bermotor}} \times 100\%$$
